FISIP SOS/10/061
2013

IDENTIFIKASI DAN ANALISIS KONFLIK PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Sosial (S.Sos)

OLEH

AROZAK

NIM 07091002014

JURUSAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2013

Rec: 23316
Reg: 23867

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

IDENTIFIKASI DAN ANALISIS KONFLIK PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Sosial (S.Sos)

OLEH

AROZAK

NIM 07091002014

JURUSAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2013

IDENTIFIKASI DAN ANALISIS KONFLIK PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012

SKRIPSI

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
Dan Dinyatakan Berhasil Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Dari Syarat-syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosiologi
Pada Tanggal 21 Maret 2013

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Dr. Zulfikri Suleman, M.A
Ketua

Mery Yanti, S.Sos, M.A
Anggota

Dr. Dadang Hikmah Purnama, M.Hum
Anggota

Faisal Nomaini, S.Sos., M.Si
Anggota

Indralaya, Juni 2013
Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Dekan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA FISIP

Dra. Dyah Hapsari ENH, M.Si
NIP. 196010021992032001

MOTTO

Selama pemiliki modal masih menancapkan taring-taringnya terhadap kekuasaan politik, maka selama itu juga prodak hukum dan politik akan mengidap cacat bawaan (Arozak.S.Sos)

Orang yang hidup bagi dirinya sendiri akan hidup sebagai orang yang kerdil dan mati sebagai orang kerdil. Tapi orang yang hidup bagi orang lain akan hidup sebagai orang besar dan mati sebagai orang besar (Sayyid Quthub)

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK

Kedua Orang Tua ku tecinta

Keluarga Besarku

Nakan-nakan ku

Almamaterku

My Lovely

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum, Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat, ridho, dan petunjukNya maka skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam dihaturkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan dan membawa kita dari zaman kebodohan kepada zaman yang terang seperti sekarang ini. Skripsi yang berjudul **"IDENTIFIKASI DAN ANALISIS KONFLIK PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012"** disusun dalam rangka melengkapi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Sosial (S.Sos) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu selesainya penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dra. Dyah Hapsari ENH, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Zulfikri Suleman, MA selaku Ketua Jurusan Sosiologi dan Ibu Mery Yanti, S.Sos., MA selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi FISIP UNSRI

3. Bapak Dr. Zulfikri Suleman. Selaku dosen pembimbing pertama skripsi yang telah banyak berkontribusi.
4. Ibu Mery Yanti. S. Sos , M.A selaku dosen pembimbing kedua yang telah banyak membantu penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen FISIP UNSRI khususnya jurusan Sosiologi
6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan jajaran yang ada.
7. Buat Kedua orang tua ku tercinta Wan, Mak, Cinta kalian berdua kepada anak mu memang takkan pernah usang, tak kan pernah berkurang kadarnya dan tidak akan termakan oleh waktu, saya merasakan tulusnya Cinta itu ketika saya kalian besarkan dengan penuh cinta.
8. Serta buat Wo, tamudo, Udo, kaka, Dongah, kaka, Engah, dongah dan Adik ku tersayang. Untuk wo ku tersayang terimakasih atas nasehat, motivasi, bantuan moril dan materilnya yang tidak akan pernah terlupakan dalam proses perjalanan hidup ku, semoga Allah senantiasa melimpahkan rizkinya serta kasih dan sayangnya pada kita semua.
9. Buat Nakan-nakan ku tercinta, Zulfikar Ali Boma (ZAB), Aulia Mutiara Putri, Muhammad Diki Rindra, Vina Doiba, Mujib, Ovah, dan Fawaz kalianlah motivasi terbesar ku.
10. Buat Umi terimakasih telah menjadi penasehat yang baik dalam menyelesaikan skripsi ini, suportan hati, doa yang tulus dan kesediaan mendengarkan keluh kesah ku selama ini.
11. Buat Kak Citra, yuk Linda dan M raditya trimakasih atas motivasi nya.

12. Buat ADK WAKI FISIP Unsri dan KAMMI Al-Aqsho Unsri
13. Buat Sahat-sahabat terbaik ku, Geral, Agus, Abdul, Trias, Arif, Teguh, Dedy, Robi, Doni, Dwi, serta Reni, listina, sari, indah, ista, widya, ratih, ica, irka, siti, Bela, Sani, dll lanjutkan perjuangan kalian semoga cepat kelar
14. Teman-teman seperjuangan angkatan 2009 Sosiologi semoga kita sukses semua, Aminn.
15. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lampung Barat yang Telah banyak Membantu meberikan banyak data.
16. Masyarakat Bukit dan Masyarakat Pesisir yang telah meladeni saya dengan baik, memberikan informasinya berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Kabupaten Lampung Barat.

Penulis menyadari bahwa skipsi ini baik bentuk maupun materi pembahasanya masih jauh dari pada sempurna. Hal ini karena keterbatasan buku-buku literatur yang tersedia pada penulis. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat positif dan membangun dari pembaca sekalian tentunya yang saya harapkan .

Akhir kata penulis harapkan, mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan suatu manfaat dan masukan serta kebaikan bagi kita semua.

Amin ya robal alamin...

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Indralaya, Juni 2013

Penulis,

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Identifikasi dan Analisis Konflik Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012". Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana tipologi konflik serta faktor-faktor apa saja yang bisa menimbulkan konflik dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab konflik dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Lampung Barat dan tipologi konflik pilkada Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif berdasarkan teori konflik. Penentuan informan dilakukan secara *snow ball*, informan penelitian ini diambil 11 informan yang keseluruhannya adalah masyarakat bukit dan masyarakat pesisir, penelitian ini juga meminta data dari KPUD Kabupaten Lampung Barat. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap yaitu tahap reduksi data, penyajian data, penafsiran data.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab konflik dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2012 adalah tidak adanya calon bupati dari daerah pesisir, tidak lolosnya salah satu calon bupati di tahapan verifikasi, isu pemekaran daerah pesisir menjadi Kabupaten Pesisir Barat, kekisruhan dpt, semangat kedaerahan serta persaingan antar partai politik dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2012 dan tipologi konflik pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2012 adalah konflik horizontal.

Kata Kunci : *Konflik dan Pemilihan Kepala Daerah*

ABSTRACK

The title of this research is Identify and Analysis of Conflict in Electing of Regent in West Lampung Regency in 2012. The problem of this research is how conflict typology and what are the factors caused conflict in Electing of Regent in West Lampung Regency in 2012. The aims of this research are to know the factors caused conflict and the conflict typology in Electing of Regent in West Lampung Regency in 2012. This research used qualitative approach based on conflict theory. The informant selected by using snow ball technique, there are 11 informants from hill society and beach society and also the data supported by West Lampung Regency KPUD. There are three steps in analyzing: data reducing, data serving, and data interpretation. The result shows that the causes of conflict in West Lampung Regency are there was no candidate from beach society, there was one of candidates who failed in verification step, there was an issue to change beach area to be West Beach Regency, the spirit of regency and competition each political party in West Lampung Regency in 2012 and the conflict typology is horizontal conflict.

Keywords: conflict, Electing of Regent.

DAFTAR ISI

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. DAFTAR : 131626
TANGGAL : 19 JUL 2013

Moto

Kata Pengantar

Abstrak

Abstrack

Daftar Isi i

Bab I Pendahuluan 01

1 Latar Belakang 01

2 Perumusan Masalah 10

3 Tujuan dan Manfaat 10

3.1 Tujuan Penelitian 10

3.2 Manfaat Penelitian 10

3.2.1 Manfaat Teoritis 10

3.2.1 Manfaat Praktis 11

4 Tinjauan Pustaka 11

5 Kerangka Pemikiran 14

5.1 Definisi Konflik 14

5.2 Pemilihan Kepala Daerah 19

5.3 Makna dan Hakekat Demokrasi 25

5.4 Otonomi Daerah 30

5.5 Pendekatan Sosiologi Dalam Konflik 32

5.6 Teori Penyebab Konflik 34

6 Metode Penelitian 39

6.1 Desain Penelitian 39

6.2 Lokasi Penelitian 39

6.3 Penentuan Informan Penelitian 40

6.4 Unit Analisis 41

6.5 Data dan Sumber Data 41

6.6 Teknik Pengumpulan Data 41

6.7 Teknik analisa Data 43

Bab II Pilkada di Kabupaten Lampung Barat 45

2.1 Deskrepsi Daerah Penelitian 45

2.1.1 Letak Geografis dan Luas Wilayah 45

2.1.2 Visi Misi dan Pelayanan Masyarakat 46

2.1.3 Kependudukan dan Angkatan Kerja 48

2.1.4 Pola Kehidupan Masyarakat 51

2.2 Peserta Pilkada Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012.... 54

2.3 Peserta Pemilih Pilkada Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012... 57

2.4 Deskrifsi Keadaan Informan.....65

Bab III Analisis dan Identifikasi Konflik Pada Pilkada Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 68

3.1 Faktor-faktor penyebab konflik pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012.....71

3.1.1 Fanatisme kedaerahan 72

3.1.2 Tidak lolosnya salah satu calon bupati ditahapan verifikasi.....76

3.1.3 Kekisruhan daftar pemilih tetap 83

3.1.4 Persaingan antar partai pikada.....87

3.1.5 Isu pemekaran daerah pesisir 95

3.2 Tipologi konflik dalam pemilihan kepala daearh Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012.....102

3.2.1 Keteganagan di masyarakat atas pengidolaan terhadap calon bupati 103

3.2.2 Khawtiran pemboikotan pilkada 110

3.2.3 Gejolak di Masyarakat ketika penetapan hasil pemilihan.....114

3.2.4 Pemboikotan jalan pada masa kampanye.....120

Bab IV Penutup 123

4.1 Kesimpulan 123

4.2 Saran 124

Daftar Pustaka .....

Lampiran-Lampiran .....

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. 1 Bagan Kerangka Pemikiran..... 38

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Barat Berdasarkan Jenis Kelamin per Maret Tahun 2012 49

Tabel II.2 Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pilkada (DP4) per Maret Thun 2012 56

Tabel II.3 Rekafitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Lampung Barat Untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 20..... 64

Tabel II.4 Daftar Informan Utama 67

Tabel II.5Daftar Informan Pendukung..... 67

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Salah satu gejala menarik setelah runtuhnya rezim orde baru selain tuntutan multi partai yakni tuntutan desentralisasi kekuasan atau otonomi daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 18 berbunyi: "Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak, asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa" (Kaho, 2007: 3).

Pemerintahan daerah adalah pelaksana fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah, yaitu pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sedangkan kepala daerah adalah kepala pemerintah daerah yang dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis terhadap kepala daerah sesuai dengan undang undang nomor 22 tahun 2003 mengatakan bahwa anggota DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah, melainkan pemilihan secara demokratis yang dilakukan oleh rakyat secara langsung melalui Pemilihan Kepala Daerah (UU Pemerintah Daerah 2004, 2006: 132-140).

Indonesia pertama kali melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah atau disebut Pilkada langsung mulai bulan Juni 2005. Pilkada ini merupakan sarana

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS JAYABAYA UPT PERPUSTAKAAN

perwujudan kedaulatan rakyat. Ada lima pertimbangan penting penyelenggaraan pilkada langsung bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. (Pembaharuan, 2007: 5)

1. Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, bahkan kepala desa selama ini telah dilakukan secara langsung.

2. Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945. Seperti telah diamanatkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, Gubernur, Bupati dan Wali Kota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Hal ini telah diatur dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3. Pilkada langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat *(civic education)*. Ia menjadi media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai nuraninya.

4. Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan dalam pilkada langsung, maka komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah, antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan.

5. Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional. Disadari atau tidak, stok kepemimpinan nasional amat terbatas. Dari jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 200 juta, jumlah pemimpin nasional yang kita miliki hanya beberapa. Mereka sebagian besar para pemimpin partai politik besar yang memenangi Pemilu 2004. Karena itu, harapan akan lahirnya pemimpin nasional justru dari pilkada langsung ini.

Setelah suksesnya Pemilu tahun 2004, mulai bulan Juni 2005 lalu di 226 daerah meliputi 11 propinsi serta 215 kabupaten dan kota, diadakan Pilkada untuk memilih para pemimpin daerahnya. Sehingga warga dapat menentukan peminpin daerahnya menurut hati nuraninya sendiri. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang menggunakan perwakilan dari partai atau dipilih oleh anggota DPRD. Namun dalam pelaksanaan pilkada ini muncul penyimpangan penyimpangan. Mulai dari masalah administrasi bakal calon sampai dengan yang berhubungan dengan pemilih.

Pilkada adalah laboratorium berdemokrasi. Kegagalan dalam melaksanakannya adalah taruhan besar. Pada sisi yang lain Pilkada juga dapat menghasilkan manfaat yang sangat besar. Percaturan antara dua sisi besar ini akan terus terjadi. Para pelakunya pun akan berjuang dengan berbagai cara dan kepentinganya, maka tak salah ketika Pilkada diartikan sebagai Resolusi Konflik antara para elite dan pendukungnya yang menginginkan kekuasan disuatu daerah. Dalam logika politik moderen, sebuah Pilkada seharusnya merupakan perujudan *local-sovereignty* (kedaulatan lakal). Pilkada harusnya merupakan ujud dari demokrasi yang berproses pada lokalitas. Lokalitas harus menjadi roh sekaligus

subtansi (isi) dari Pilkada. Lokalitas yang dimaksud tentu saja bukan lokalitas dalam konteks pendekatan politik identitas berdasrkan sentiment SARA (*Tribalisme Politik*), dan bukan pula lokalitas dalam arti Pilkada yang terisolasi dari jangkauan sentral kekuasaan (Sarwi, 2012:68).

Dalam pelaksanaan Pilkada ini pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Seringkali bagi pihak yang kalah tidak dapat menerima kekalahannya dengan lapang dada, sehingga dia akan mengerahkan massanya untuk mendatangi KPUD setempat. Hal ini membuktikan sangat rendahnya kesadaran politik masyarakat, sehingga dari KPUD sebelum melaksanakan pemilihan umum, sering kali melakukan Ikrar siap menang dan siap kalah. Namun tetap saja timbul masalah.

Konflik adalah suatu kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif atau hubungan antara dua pihak atau lebih, individu atau kelompok yang memiliki, atau yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Konflik timbul karna ketidak seimbangan antara hubungan-hubungan sosial, perbedaan pandangan, kurang meratanya kemakmuran dan akses yang tidak seimbang terhadap sumebr daya, serta kekuasaan yang tidak seimbang . ketika sasaran dan kepentingan bertentangan atau tidak sesuai maka terjadiah konflik (Simon Fishe, Dkk, 2000:5).

Konflik merupakan gejala umum dalam masyarakat atau istilah lain dikenal *"everyday to life"*, artinya seperti tidak ada individu atau masyarakat tanpa konflik. Konflik sudah menjadi bagian hidup manusia. Konflik didefenisikan sebagai pertentangan yang bersifat langsung dan didasari antara

individu-individu atau kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan. Istilah konflik dalam ilmu politik acapkali dikaitkan dengan kekerasan, seperti kerusuhan, kudeta, terorisme dan revolusi. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia konflik politik adalah percekcokan, pertentangan, perselisihan dan ketegangan (Syaifudin, 1986:7).

Dalam pemilihan Bupati Kabupaten Lampung Barat yang dilaksanakan pada tanggal 27 september 2012, sejak awal telah memunculkan beragam potensi konflik, Masyarakat Lampung Barat merupakan masyarakat yang majemuk, yang memiliki perbedaan-perbedaan seperti perbedaan agama, suku, adat, bahasa, serta perbedaan-perbedaan yang mengandung unsur kedaerahan.

Menurut Clifford Geertz, masyarakat majemuk merupakan masyarakat yang terbagi-bagi kedalam sub-sub sistem yang kurang lebih berdiri sendiri-sendiri, kemudian masing-masing subsistem tersebut terikat kedalam oleh ikatan-ikatan yang bersifat *primordial* (Nasikun,2011:40).

Potensi konflik yang paling terlihat dalam pemilihan bupati Kabupaten Lampung Barat yakni ketika isu pemekaran kabupaten Pesisir Barat, hasil pecahan dari Kabupaten Lampung Barat kembali dihembuskan, isu ini sebenarnya sudah lama muncul bahkan ketika Pilkada 2007 sebelumnya isu tersebut sudah ada, namun hingga kini isu tersebut belum terealisasi, nampaknya isu pemekaran ini memang sudah menjadi komoditi politik setiap kali akan dilaksanakannya pesta demokrasi di Bumi Beguai Jejama ini, isu akan dimekarkannya daerah pesisir menjadi kabupaten baru yakni pesisir barat semakin hangat diperbincangkan.

Ketika isu pemekaran ini mulai hangat kembali, disadari atau tidak oleh pemerintah terkait dikalangan masa akar rumput (masyarakat) telah terbentuk gap-gap, antara masyarakat bukit dan masyarakat pesisir. Karena di Kabupaten Lampung Barat ini terdiri dari masyarakat bukit yang tinggal dipegunungan dan masyarakat pesisir yang tinggal dipesisir pantai, masyarakat pesisir menginginkan calon bupati yang maju dalam pemilihan bupati Kabupaten Lampung Barat tahun 2012 ini adalah putra pesisir, agar bisa meujudkan cita-cita pemekaran yang memang sudah lama diidam-idamkan oleh masyarakat pesisir, begitupun sebaliknya masyarakat bukit menginginkan calon bupati yang maju dalam pilkada ini adalah orang dari bukit, ini merupakan salah satu bentuk konflik horizontal.

Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi anatara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompak yang memiliki status atau derajat yang sama, di Kabupaten Lampung Barat terdiri dari dua kelompok masyarakat, yakni masyarakat bukit dan masyarakat pesisir, yang sama-sama menginginkan bupati terpilih nanti berasal dari daerah mereka masing-masing.

Hadirnya calon yang masih menjabat sebagai bupati Kabupaten Lampung Barat (*incumbent*) dalam pilkada Lampung Barat ini memunculkan beragam pandangan dari lapisan masyarakat, dari pengamatan masyarakat calon *incumbent* memiliki peluang yang cukup besar dalam memenangkan pilkada ini nanti, sebab posisi nya yang sekarang sebagai orang yang berkuasa di Lampung Barat bisa saja memanfaatkan sarana dan prasarana umum sebagai alat kampanye dan penggalangan dukungan kepadanya.

Selain itu partai-partai peserta pilkada yang semula telah memunculkan kandidat calon bupati yang mereka usung mulai menahan diri, setelah ada pendekatan yang dilakukan oleh calon *incumbent* kepada pimpinan-pimpinan partai politik peserta pilkada ditingkat pusat, ini terlihat ketika DPC Partai Hanura tingkat kabupaten yang semula merekomendasikan H. Fiterson sebagai calon bupati yang mereka usung, lalu kemudian kembali mengeluarkan rekomendasi dari DPD Partai Hanura Tingkat Provinsi, untuk pasangan *incumbent*. Rekomendasi ganda ini baru diketahui ketika hari terakhir penutupan pendaftaran calon Bup/Wabup Lampung Barat, KPUD pun memutuskan untuk membatalkan dukungan partai hanura kepada H. Fiterson dan mengalihkannya kepada pasangan *incumbent*, padahal dalam undang-undang pilkada tidak ada aturan yang jelas terkaitan dengan siapa yang paling berhak memberikan rekomendasi apakah DPC tingkat Kabupaten atau DPD tingkat Provinsi, inilah yang saat ini sedang diperjuangkan oleh tim pengacara dan masa pendukung Hi. Fiterson di PTUN Provinsi Lampung *(Tribun Lampung, 12:5)*

Ditolaknya berkas H. Fiterson Syukri dan Rusli Rasyaid oleh KPUD Lampung Barat sontak membuat masa pendukung memanas, ratusan masa yang tergabung dalam Koalisi Lampung Barat Bersatu Bersama Membangun (LB3M) mendatangi dan mendesak komisi pemilihan umum (KPU) Lampung Barat untuk meloloskan pasangan H. Fiterson Syukri dan Rusli Rasyid sebagai salah satu calon bupati lampung barat yang akan dipilih pada tanggal 27 September 2012 *(Lampung Pos Kota 12:8)*.

Setelah gugurnya cabup dan cawabup, H. Fiterson dan Rusli Rasyid di tahapan verifikasi oleh KPUD lampung barat maka bisa dipastikan calon Bupati yang Lolos Perivikasi KPUD Lampung Barat yakni hanya dua pasang calon bupati dan wakil bupati, yakni Drs. H. Mukhlis Basri.MM. sebagai calon *incumbent* putra daerah balik bukit tepatnya kecamatan sumber jaya ini berpasangan dengan Drs. H. Makmur Azhari dari wilayah pesisir tepatnya dikecamatan bengkunat belimbing. Pasangan incumbent ini membawa slogan "Mantapkan", pasangan ini juga mendapat no urut 1 dalam pemilihan nanti. Sementara rival keduanya dalam memperebutkan 295.326 suara pemilih Lampung Barat yakni Drs. Khotob Jalaluddin berpasangan dengan Erwin Suhendra. SE. keduanya yakni putra daerah dari wilayah bukit mereka membawa slogan "gerakan perubahan", pasangan ini mendapatkan no urut 2, persaingan keduanya ini menarik untuk dikaji, mulai dari persaingan partai pengusung, persaingan masing-masing tim sukses, serta semangat pimordialisme yang sengaja dimunculkan yakni putra daerah bukit dan putra daerah pesisir (*Radar Lambar 12:4*)

Pelaksanaan pimilihan kepala daerah Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 27 september 2012 lalu berlangsung aman, tertib dan lancar, walaupun dalam pemilihan ini tidak ada tokoh masyarakat pesisir yang mencalonkan diri sebagai calon bupati, yang ada yakni calon wakil bupati berpasangan dengan calon *incumbent,* dalam pemilihan tersebut yang keluar sebagai pemanang ialah calon bupati *incumbent,* yang berpasangan dengan tokoh masyarakat pesisir. Pada awal-awal penetapan kemenangan pasangan nomor urut 1 (satu) ini oleh KPUD

Kabupaten Lampung Barat, sempat terjadi aksi demonstrasi yang menuntut pihak KPUD untuk membatalkan kemangan tersebut, aksi damai yang sempat memanas tersebut hanya berlangsung satu hari. Aksi demonstrasi yang berlangsung tersebut mengatas namakan Gerakan Penyelamat Lampung Barat (GPLB) *(Radar Lambar 12: 1).*

Keadaan yang demikian ini jelas menimbulkan kebingungan dikalangan masyarakat Lampung Barat, Gap-Gap antara masyarakat Bukit dan masayarakat Pesisir pun kian terlihat, dikhawatirkan panatisme yang berlebihan terhadap Idola pemimpin yang diinginkan dan semangat primordialisme yang sangat tinggi akan memunculkan konflik di kalangan masyarakat Lampung Barat.

2. PERUMUSAN MASALAH

Dari uraian tersebut fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan timbulnya konflik pada pemilihan Bupati Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012?
2. Bagaimana tipologi konflik pada pemilihan Bupati Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012?

3. TUJUAN DAN MANFAAT

3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor penyebab konflik pada Pilkada di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012.
2. Untuk mengetahui bagaimana tipologi konflik pada Pilkada di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012.

3.2. Manfaat Penelitian

3.2.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bemanfaat sebagai tambahan informasi dan juga bermanfaat bagi perkembangan ilmu-ilmu sosial khususnya Sosiologi Politik dan Manajemen Konflik dalam mengkaji dan memahami berbagai dimensi yang berkaitan dengan konflik yang terjadi dalam Pemilihan Kepada Daerah.

3.2.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan rujukan awal bagi studi lanjutan dalam mengungkap berbagai aspek yang berkaitan dengan Identifikasi dan Analisis Konflik Pada Pemilihan Kepala Daerah
2. Sebagai bahan rekomendasi bagi lembaga-lembaga Pelaksana dan Pengawas Pemilihan Kepala Daerah.

4. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang mengungkapkan tentang identifikasi dan analisis konflik dalam pemilihan kepala daerah belum banyak dilakukan walaupun telah banyak wacana-wacana yang menyangkut tentang masalah-masalah mengenai konflik dalam pemilihan kepala daerah.

Salah satu penelitian yang mengenai konflik dalam pemilihan kepala daerah yang berjudul " ***Konflik Dalam Pilkada Langsung tahun 2005-2008"*** yang dilakukan oleh **Moch. Nurhasim,** dalam penelitian ini ada tiga bagian utama dari hasil kajian. Bagian pertama ialah masalah-masalah apa yang muncul dalam penyelenggaraan pilkada 2005-2008? Apa kontribusi dari perundang-undangan ini terhadap daerah penelitian? Kelemahan-kelemahan apa yang menyebabkan timbulnya perbedaan penafsiran yang dapat menyulut konflik? Bagian kedua akan membahas bagaimana konflik itu terjadi? Dalam situasi seperti apa? Dan bagaimana formula penyelesaian atau sengketa pilkada yang dilakukan oleh

Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Daerah dan Pemerintah pusat? Sementara itu bagian ketiga menjalaskan bagaimana dampak yang ditimbulkan?

Menurut penelitian ini maslah krusial dalam pilkada 2005-2008 tampak sejumlah masalah yang terjadi menjelang dan saat pelaksanaan pilkada secara langsung. Pilkada langsung yang dilaksanakan di Indonesia ini tercatat sejumlah masalah krusial, baik pra maupun dalam pelaksanaan nya secara langsung. Masalah krusial yang terjadi sebelum penyelenggaraan pilkada diantaranya adalah *pertama* masalah penetapan tanggal pelaksanaan pilkada kasus ini terjadi di kabupaten Kebumen. *Kedua*, masalah pendanaan, persoalan pendanaan ini terkait dengan kemampuan daerah menyediakan dana untuk menyelenggarakan pilkada yang umumnya tersedot oleh penyelenggaraan dan kurangnya dana untuk logistik pilkada. *Ketiga*, masalah penyaringan dan penetapan calon ditahapan ini politik uang *(Money Politic)*, kerap terjadi, partai-partai parlemen dan partai-partai non parlemen biasanya memasang harga tertu bagi para calon kepala daerah untuk bisa mengendarai partai yang mereka inginkan, walaupun partai tersebut akan memajukan kader nya sendiri biasanya mereka seolah-olah membuka kesempatan untuk orang lain yang akan mengadu keberuntungan dalam pemilihan kepala daerah.

Adapun masalah krusial pada saat penyelenggaraan yang terjadi menurut penelitian ini adalah *pertama*, masalah daftar pemilih tetap (DPT). DPT adalah salah satu masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan pilkada. *Kedua*, persoalan netralitas birokrasi dan pegawai negri sipil (PNS) dalam pelaksanaan pilkada.

Ketiga, persoalan kompleks lainnya adalah terjadi konflik dalam penyelenggaraan pilkada. *Keempat*, yang tidak kalah penting adalah masalah regulasi atau peraturan tentang pilkada.

Pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan konteks sosial. Konkretnya, pilihan seseorang dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah dipengaruhi latar belakang demografi atau sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan dan agama. Pada pendekatan sosiologis konteks indikator pendidikan memang turut mempengaruhi seperti sebagaimana yang diungkapkan dalam studi yang dilakukan oleh **Almond,** dalam **Irwan Noor,** sebagaimana yang dikutip oleh **Rush** mengemukan bahwa makin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka makin sering membicarakan politik. Hasil studi tersebut didukung oleh penelitian yang dilkukan oleh **Lipset** dalam Budiarjo (2007), bahwa orang yang berpendidikan rendah mempunyai tingkat partisipasi politik yang rendah.

Hasil penelitian yang relevan untuk melengkapi penelitian ini adalah tentang **"Pelaksanaan Pilkada Langsung di Indonesia"** penelitian ini dilakukan oleh litbang JPPR. Penelitian ini mengungkap penyebab utama konflik massa dalam Pilkada adalah soal rekapitulasi suara, daftar pemilih, verifikasi calon dan kecurangan-kecurangan pilkada yang tidak ditindak lanjuti. Kekurangan ini lah yang harus diperbaiki agar pelaksanaan pilkada kedepannya bisa memperkuat konsolidasi demokrasi. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan pilkada maka paling tidak ada 3 hal yang bisa kita lakukan, *pertama*, yakni melakukan

amandemen yang komprehensif terhadap aturan-aturan pilkada sehingga permasalahan seperti sistem pendaftaran pemilih yang selama ini bermasalah bisa ditanggulangi, *kedua*, merekrut para penyelenggara pilkada dari tingkat KPU Provinsi sampai KPPS yang berkualitas dan imparsial sehingga kecurangan dalam proses rekapitulasi dan juga verifikasi calon bisa dihindari, *ketiga*, melaksanakan pendidikan politik yang massif bukan hanya kepada masyarakat umum tetapi juga kepada para elit politik agar mereka bisa lebih dewasa dalam berpolitik dan menghindari praktek politik yang menghalalkan segala cara.

Berbeda dengan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, penelitian yang akan saya lakukan berusaha mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk konflik dan faktor penyebab konflik dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012, mengingat di Kabupaten Lampung Barat terdapat dua kelompok besar masyarakat yakni masyakarat bukit dan masyarakat pesisir, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berusaha menggambarkan (*deskripsikan*) berdasarkan hasil obesrvasi, wawancara dengan informan dan dari data-data yang diperoleh di lapangan.

5. KERANGKA PEMIKIRAN

5.1 Definisi Konflik

Konflik adalah suatu kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan sering bersipat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Berbagai perbedaan pendapat dan konflik biasanya diselsaikan tanpa kekerasan, dan sering menghasilkan situasi yang lebih baik bagi sebagian besar atau semua pihak yang terlibat. Karena itu konflik tetap berguna, apalagi memang merupakan bagian dari keberadaan kita. Dari tingkat mikro, antar pribadi hingga tingkat kelompok, organisasi masyarakat dan negara, semua bentuk hubungan manusia-sosial, ekonomi dan kekuasaan mengalami pertumbuhan, perubahan dan konflik.

Adapun arti konflik menurut Karl Marx yakni: konflik muncul disebabkan adanya pertentangan anatara dua kelas, yakni kelas *borjuis* yakni nama khusus untuk para kapitalis dalam ekonomi modern. Kelas ini memiliki alat-alat produksi dan mepekerjakan pekerja upahan dengan upah rendah yakni kelas *Proletar*. Kelas proletar inilah yang nantinya akan menjadi kelas yang dimonopoli oleh kelas borjuis, konflik antara kelas borjuis dan kelas proletar adalah contoh lain dari kontradiksi material yang sebenarnya. Kontradiksi ini berkembang menjadi kontradiksi antara kerja dan kapitalisme, tidak satu pun dalam kontradiksi-kontradiksi ini yang bisa diselsaikan kecuali dengan mengubah struktur kapitalis (Ritzer, 2008:65).

Sebagai catatan pendahuluan dari teori konflik Kalr Marx perlu diperhatikan bahwa menurut Marx masyarakat kapitalis terdiri dari tiga kelas, bukan dua kelas, sebagaimana anggapan pada umumnya, juga dalam banyak

kalangan Marxis. Tiga kelas itu adalah kaum buruh (mereka hidup dari upah), kaum pemilik modal (hidup dari laba) dan para tuan tanah (hidup dari rente tanah), namun dalam analisis keterasingan tuan tanah tidak dibicarakan dan pada akhirnya kapitalisme para tuan tanah akan menjadi sama dengan para pemilik modal jadi yang menjadi pokus yakni dua kelas antara kelas *borjuis* dan *proletar* (Magnis, 2003: 113)

Konflik kolektif bertolak dari kondisi masyarakat, di dalam masyarakat terdapat kelas-kelas sosial yang mempunyai perbedaan kepentingan. Kontradiksi yang tajam antara kelas sosial yang satu dengan kelas sosial yang lain mengakibatkan perjuangan kelas yang disertai dengan kekerasan. Perjuangan kelas merupakan bentuk konflik politik.

Selain itu menurut Ralf Dahrendorf konflik muncul disebabkan oleh kekuasan dan wewenang, keuasaan dan wewenang berarti subordinasi dan superordinasi, mereka yang menduduki posisi superordinsi tersebut diharapkan mengendalikan subordinat. Kekuasaan dan wewenang merupkan sumberdaya langka yang sering kali menjadi penyebab terjadinya konflik.(Ritzer, 2008: 284).

Adapun ciri - ciri konflik menurut Wijono (1993:37) adalah:

1. Setidak-tidaknya ada dua pihak secara perseorangan maupun kelompok yang terlibat dalam suatu interaksi yang saling bertentangan.
2. Paling tidak timbul pertentangan antara dua pihak secara perseorangan maupun kelompok dalam menggapai tujuan, memainkan pran dan ambigius atau adanya nilai-nilai atau norma yang saling berlawanan

3. Munculnya interaksi yang seringkali ditandai oleh gejala-gejala prilaku yang direncanakan untuk saling meniadakan , mengurangi, dan menekan terhadap pihak lain agar memproleh keuntungan seperti status, jawaban, tanggung jawab, pemenuhan berbagai macam kebutuhan fisik.
4. Munculnya tindakan yang saling berhadap-hadapan sebagai akibat pertentangan yang berlarut-larut.
5. Munculnya ketidak seimbangan akibat dari usaha masing-masing pihak yang terkait dengan kedudukan, status social, pangkat, golongan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, prestise dan sebagainya.

Menurut tipologinya, konflik dibagi menjadi dua yaitu (Simon Fisher, dkk. (2001:7):

1. Konflik Vertikal

   Konflik Vertikal adalah konflik yang terjadi antar negara disatu sisi melawan masyarakat *(civil society)* disisi lain.
2. Konflik Horisontal

   Konflik Horisontal adalah konflik yang terjadi antar kelompok masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.

Sedangkan menurut sifatnya, konflik terdiri dari dua tipe yaitu

1. Laten

   Adalah konflik yang sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat kepermukaaan sehingga bisa ditangani secara efektif.
2. Manifest

Konflik yang berakar dalam dan sangat nyata, dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya.

Dalam mengenal konflik dari akarnya ini dikenal sebuah teori yang menjelaskan hubungan pemantik, serta perantara dan akar konflik, yaitu dikenal sebagai teori Lilin. Dalam teori liilin ini ada tiga (3) faktor yang harus terkait satu sama lain dalam suatu konflik yaitu:

a. Pemantik adalah pihak-pihak yang menyalakan api
b. Isu-isu, aktor-aktor, ketegangan-ketegangan struktur dalam masyarakat
c. Minyak adalah akar dari konflik

Sistem pemilihan kepala daerah sejak tahun 2005 dilaksanakan secara langsung, semangat dilaksanakannya pilkada adalah koreksi terhadap sitem demokrasi tidak langsung *(pewakilan)* di era sebelumnya, di mana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPR, menjadi demokrasi yang berakar langsung pada pilihan rakyat *(pemilih)*. Melalui, pilkada masyarakat sebagai pemilih berhak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara, dalam pemilihan kepada daerah tersebut biasanya calon-calon yang maju melalui calon-calon perseorangan atau melalui partai-partai selaku pengusung dan pendukung.

5.2. Pemilihan Kepala Daerah

Konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah, perlu adanya oganisasi pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang mampu melaksanakan keinginan kemasyarakatan secara efektif dan efisien. Terkandung di dalamnya makna yang mampu memberikan pelayanan publik yang relatif memuaskan dan mengakomodir keinginan masyarakat. Untuk bisa mewujudkan tujuan tesebut maka harus ada pemimpin dalam daerah, seperti Gubernur, Bupati dan walikota, pemimpin daerah tersebut dipilih melalui pemilihan kepala daerah.

Sejak memasuki gelombang refomasi, pilkada merupakan salah satu hajatan politik lokal yang semakin mendapatkan perhatian yang sangat tinggi dari masyarakat lokal. Sehingga acap kali proses politik pilkada ditandai dan diwarnai suhu politik yang memanas. Situasi yang agak panas dan lebih meriah dalam pilkada sangatlah wajar, karena pilkada pada era sekarang relatif egaliter, terbuka dan siapapun boleh mencalonkan diri (Siswanto. 2006: 247).

Dalam logika politik modern, sebuah Pilkada seharusnya merupakan perujudan *local-sovereignty* (kedaulatan lokal). Pilkada harusnya merupakan ujud dari demokrasi yang berproses pada lokalitas. Lokalitas harus menjadi roh sekaligus subtansi (isi) dari Pilkada. Lokalitas yang dimaksud tentu saja bukan lokalitas dalam konteks pendekatan politik identitas berdasrkan sentiment SARA (Tribalisme Politik), dan bukan pula lokalitas dalam arti Pilkada yang terisolasi dari jangkauan sentral kekuasaan (Sarwi, 2012:68).

UPT PERPUSTAKAAN

Meskipun pada saat sekarang dalam pilkada seringkali menimbulkan gejolak dan dinamika politik yang menjadikan suhu politik lokal relatif memanas, bukan berarti akan menjadi penyebab rusaknya sendi-sendi persatuan dan kesatuan masyarakat dan daerah. Suhu politik yang memanas dan hiruk pikuk saling dukung, saling tekan serta perang urat syarap sebagai warna-warni demokrasi akan berahir dengan sendirinya setelah pesta pilkada usai

Menurut Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pasal 56 mengatakan bahwa:

1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

2. Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik

Selain itu menurut Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pasal 59 mengatakan sebagai berikut

1. Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

2. Partai politik atau gabungan parti politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mendaftarkn pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang – kurangnya 15% (lima belas persen)

dari jumlh kursi DPRD atu 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan

3. Partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud melalui mekanisme yang demokratis dan transparan

4. Dalam proses penetapan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik memperhatikan pendapat atau tanggapan masyarakat

5. Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan pasangan calon, wajib menyerahkan:

    a. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh partai politik atau pemimpin partai politik yang bergabung

    b. Kesepakatan tertulis antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon

    c. Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pemimpin partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung

    d. Surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah secara berpasangan

calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya

7. Masa pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon.

Selain undang-undang diatas pemerintah mempertegas tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2005 Pada Pasal 1 yakni:

1. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah provinsi dan kabupaten /kota berdasarkan Undang-Undang 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah
2. Kepala daeah dan wakil kepala daerah adalah gubernur dan wakil gubernur untuk povinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, seerta walikota dan wakil walikota untuk kota.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat dareah sebagai unsur penyelenggara pemilihan daerah
4. Daerah pemilihan adalah provinsi untuk gubernur/wakil gubernur dan kabupaten/kota untuk pemilihan bupati/ wakil bupati atau walikota/wakil walikota

e. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon

f. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

g. Surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan pegawai negeri sebagai calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

h. Surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya bagi pimpinan DPRD tempat bersangkutan menjadi calon didaerah yang menjadi wilayah kerjanya

i. Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah

j. Kelengkapan persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pasal 58

k. Naskah visi, misi dan program dari pasangan calon secara tertulis.

6. Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon dan pasangan

5. Pemilih adalah penduduk yang beusia sekurang-kurangnya 17 tahun atau sudah pernah kawin yang tedaftar didaerah pemilihan.
6. Komisi pemilihan umum daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang no 12 tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang No 32 tahun 2004 untuk menyelenggarakan pemilihan diprovinsi dan kabupaten kota.
7. Penitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara yang selanjutannya disebut PPK, PPS dan KPPS adalah pelaksana pemungutan suara dalam pemilihan pada tingkat kecamtan, desa/kelurahan dan tempat pemungutan suara.
8. Tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilihan memberikan suara pada hari pemungutan suara.
9. Pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
10. Partai politik adalah partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 12 tahun 2003
11. Gabungan partai politik adalah dua partai politik peserta pemilihan umum atau lebih, yang sama-sama bersepakat mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

12. Kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut kempanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih denngan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon.
13. Tim pelaksana kempanye yang selanjutnya disebut tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang bertugas dan berkewenanngan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
14. Panitia pengawas adalah pengawas pemilihan yang dibentuk oleh DPRD yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan.
15. Pemantau pemilihan adalah pelaksana pembantu pemilihan yang telah terdaptar dan memperoleh akreditasi dari KPUD

Berdasarkan uraian yang dikemukakan, maka pada hakekatnya pilkada merupakan pranata terpenting dalam suatu daerah otonom, dan berfungsi memenuhi tiga prinsip pokok dalam demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, dan pergantian pemerintah secara teratur.

5.3. Makna dan Hakekat Demokrasi

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah diterapkan prinsip demokrasi. Sesuai dengan pasal 18 ayat 4 UUD 1945, kepala daerah dipilih secara demokratis. Dalam UU NO.32 Tahun 2004, pasal 58 calon kepala daerah dapat juga diajukan dari calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Kata demokrasi terkesan sangat akrab dan seakan-akan sudah dimengerti begitu saja. Dalam banyak perbincangan mulai dari yang serius sampai yang santai dimeja makan kata demokasi sering terlontar. Namun apa dan bagaimana sebenarnya makna dan hakikat subtansi demokrasi mungkin belum sepenuhnya dimengerti dan dihayati, sehingga perbincangan tentang demokrasi bisa saja tidak menyentuh makna dan hakikat subtansi serta dilakukan secara tidak demokratis.

Demokasi sebagai suatu sistem telah dijadikan altenatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa negara. Seperti diakui oleh Moh. Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. *Pertama*, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental; *kedua*, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya. Pengertian tentang demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis). Secara etimologis "demokasi" terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu "*demos*" yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan "*cratein*" atau "*cratos*" yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa *demos-cratein* atau *demos-cratos* (demokrasi) adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat (Gatra,2007:190).

Begitupun dalam pemilihan kepala daerah kabupaten lampung barat, untuk mengujudkan kedaulatan rakyat maka dalam pemilihan kepala daerah kabupaten

lampung barat dilakukan pemilihan secara langsung oleh rakyat, sebagai ujud demokrasi yang sesungguhnya.

Sementara itu, pengertian demokrasi secara istilah sebagaimana dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut: menurut Joseph. A Schmeter demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Menuut Sidney Hook demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Sedangkan menurut Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka diwilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan para wakil mereka yang telah terpilih. Kemudian menuut Henry B. Mayo demokrasi adalah sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunujukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secaa efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Dengan demikian makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan

rakyat. Dengan demikian negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Dari sudut organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.

Dari beberapa pendapat diatas diperoleh kesimpulan bahwa hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan ditangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Kekuasaan pemerintah berada ditangan rakyat mengandung pengertian tiga hal: *Pertama,* pemerintahan dari rakyat *(government of the people)* mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemeintahan yang sah dan diakui *(legitimate government)* di mata rakyat berarti suatu pemerintahan yang mendapatkan pengakuan dan dukungan yang diberikan oleh rakyat. Legitimasi bagi suatu pemerintahan sangat penting karena dengan legitimasi tersebut, pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya sebagai ujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya. Pemerintahan dari rakyat memberikan gambaran bahwa pemerintahan yang sedang memegang kekuasaan dituntut kesadarannya bahwa pemeintah yang sedang memegang kekuasaan dituntut kesadarannya bahwa pemerintahan tersebut dipeoleh melalui pemilihan dari rakyat bukan dari pembeian wangsit atau kekuasaan supranatural. *Kedua* , pemerintahan oleh rakyat *(government by the people.* Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalannkan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan diri dan keinginannya sendiri. Selain itu juga mengandung pengertian bahwa dalam menjalankan kekuasaannya,

pemerintah berada dalam pengawasan rakyat. Karena itu pemerintah harus tunduk pada pengawasan rakyat *(social control)*. Pengawasan rakyat dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung yaitu melalui perwakilannya dipaleman (DPR). Dengan adanya pengawasan oleh rakyat (*social control*) akan menghilangkan ambisi otoriterianisme para penyelenggara negara. *Ketiga,* pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*) mengandung pengertian bahwa kekuasaan diberikan oleh rakyat kepada pemeintah itu dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat haus didahulukan dan diutamakan diatas segalanya. Untuk itu pemerintah haus mendengarkan dan mengakomodasi aspirasi rakyat dalam memutuskan dan menjalankan kebijakan dan program-pogramnya, oleh karna itu pemerintah harus membuka kanal-kanal (saluran) dan ruang kebebasan serta menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya baik melalui media pers maupun secara langsung (Ubaidillah,2000: 109-112).

Untuk meujudkan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum (pemilu). Pemilu bisa menentukan siapa yang menjadi penguasa untuk mengatur kehidupan rakyat sehari-hari, dan juga menentukan wakil rakyat untuk duduk dalam lembaga perwakilan rakyat dan menentukan apa yang menjadi kehendak rakyat, Pemilihan Kepala daerah dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. (Pakpahan,2006:135)

5.4 Otonomi Daerah

Istilah otonomi daerah dan desentralisasi dalam konteks bahasan sistem penyelenggaraan pemerintahan sering digunakan secara campur aduk. Kedua istilah tersebut secara akademis bisa dibedakan, namun secara praktis dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dipisahkan. Karena itu tidak mungkin masalah otonomi daerah dibahas tampa mempersandingkannya dengan konsep desentralisasi. Bahkan menurut banyak kalangan otonomi daerah adalah desentralisasi itu sendiri. Kedua istilah tersebut bagaikan dua mata koin yang saling menyatu namun dapat dibedakan. Dimana desentralisasi pada dasarnya mempersoalkan pembagian kewenangan kepada organ-organ penyelenggara negara, sedangkan otonomi menyangkut hak yang mengikuti pembagian wewenang tersebut (Rosyada, 2005:173).

Berbagai defenisi tentang desntralisasi dan otonomi daerah telah banyak dikemukakan oleh para pakar sebagai bahan perbandingan dan bahasan dalam upaya menemukan pengertian mendasar tentang pelaksanaan otonomi daerah sebagai manifestasi disentralisasi. Otonomi dalam makna sempit dapat diartikan sebagai *'mandiri'* sedangkan dalam makna yang lebih luas diartikan sebagai *'bedaya'*. Otonomi daerah dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenaii kepentingan daerahnya sendiri. Jika daerah sudah mampu mencapai kondisi tersebut, maka daerah dapat dikatakan sudah berdaya untuk melakukan apa saja secara mandiri tampa tekanan dari luar (Ubaidillah, 2000 : 148).

Desentralisasi menurut M. Turner dan D. Hulme adalah : Transfer kewenangan untuk menyelenggarakan beberapa pelayanan kepada publik dari seseorang atau agen pemerintah pusat kepada beberapa individu atau agen lain yang lebih dekat kepada publik yang dilayanni. Sedangkan menurut Rondinelli desentralisasi merupakan transfer tanggung jawab dalam perencanaan, menejeman dan alokasi dari sumber-sumber dari pemerintah pusat dan agen-agennya kepada unit kementrian pemerintahan pusat, unit yang ada dibawah level pemerintah, otoritas regional atau fungsional dalam wilayah yang lebih luas, atau lembaga privat non pemerintah dan organisasi nirlaba (Yuwono, 2001:27-28).

Sementara itu Sahid Javid Burki dk, mengatakan desentralisasi adalah : desentralisasi merupakan adanya proses perpindahan kekuasaan politik, fiskal dan administratif kepada unit pemerintah sub nasional. Oleh karna itu menurutnya yang terpenting menurutnya adalah adanya pemerintahan daerah yang terpilih memalui pemilihan lokal *(electedsub-national government)* . dan jika tidak maka negara tersebut tidak dapat dianggap sudah terdesentalisasikan. Ia menekan pada pentingnya pemerintahan daerah yang terpilih ini karna dua alasan. Pertama, alasan yang mungkin ambisius dan berisiko bawha reformasi (desentralisasi, dekonsentrasi, dan privatisasi) tesebut berlangsung didaerah. Kedua, implikasi behaviral yang unik dari desentralisasi. Jadi desntalisasi adalah pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Rosyada, 2005:151-152).

5.5. Pendekatan Sosiologi dalam konflik

Sosiologi sebagai ilmu yang consecn terhadap masyarakat, dapat digunakan sebagai alat yang digunakan dalam melihat berbagai gejala sosial, baik gejala yang sifatnya equilibrium atau bahkan gejala konflik dalam masyarakat. Berikut beberapa defenisi sosiologi menurut Soerjono Soekanto dalam pengantar sosiologi (Soekanto , 2007: 17-18) yakni :

a. *Pitirim Sorokin* mengatakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari:
    i. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial (misalnya antara gejala ekonomi, gerakan masyarakat dengan politik dan lain sebagainya)
    ii. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala-gejala non sosial (misalnya gejala geografis, biologis, dan sebagainya)
    iii. Ciri-ciri umum untuk jenisgejala sosial.
b. *Raucek dan Warren* mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari antara manusia dalam kelompok-kelompok
c. *William F. Ogbrun Meyer F. Nimkoff* berpendapat bahwa sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial
d. *J.A.A van Doorn dan C.J. Lammers* berependapat bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil.

e. *Selo Soemarjan dan Soelaeman Soemardi* mengatakan bahwa sosiologi atau ilmu masyarakat ialah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Selanjutnya menurut Selo Soemarjan dan Soelaeman Sumardi , struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok yaitu kaidah-kaidah sosial (norma-norma sosial), lembaga-lembaga sosial kelompok-kelompok serta lapisan-lapisan sosial. Proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama, umpamanya pengaruh timbal balik antara segi kehidupan ekonomi dan lain sebagainya. Salah satu proses sosial yang bersifat tersendiri ialah dalam hal terjadinya perubahan-perubahan di dalam struktur sosial.

Dahrendrof memusatkan perhatiannya pada struktur sosial yang lebih besar yang menjadi perhatiannya ialah berbagai posisi dalam masyarakat memiliki otoritas yang berlainan. Bagi Dahrendrof tugas pertama analisis konflik adalah mengidentifikasi beragam peran otoritas dalam masyarakat. Otoritas yang melekat pada posisi adalah elemen kunci dalam analisis Dahrendrof. Selain itu ada istilah kunci lain dalam teori Dahrendrof yakni *kepentingan.* Kelompok yang berada di puncak dan di bawah ditentukan oleh kepentingan bersama, ia menyakini bahwa kepentingan-kepentingan yang sekilas bersifat psikologis, pada dasarnya merupakan fenomena skala besar.(Ritzer, 2008:284)

5.6 Teori Penyebab Konflik

Dalam buku Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak Simon Fisher, dkk. (2001:8-9), menjelaskan tentang berbagai teori penyebab konflik

1. *Teori hubungan masyarakat* menganggap bahwa konflik disebabkan oleh pola risasi yang terus terjadi, ketidak percayaan dan permusuhan antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat.sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah:
    - Meningkatkan konsumsi dan saling pengertian anatar kelompok-kelompok yang mengalami konflik
    - Mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada didalamnya
2. *Teori negosiasi prinsip* mengaggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dengan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah :
    - Membatu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk memisahkan prasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu, dan memampukan mereka untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan-kepentingan mereka daripada posisi tertentu yang sudah tetap.
    - Melnacarkan proses pencapaian kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak.
3. *Teori kebutuhan manusia* berasumsi bahwa konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia seperti, fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Keamanan,

identitas, pengakuan, partisipasi dan otonomi sering merupakan inti pembicaraan. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah:

- Memebantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, dan menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ittu.
- Agar pihak-pihak yang mengalami konflik mencapai kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan dasar semua pihak

4. *Teori identitas* berasumsi bahwa konflik disebabkan karna identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan dimasa lalu yang tidak diselesaikan. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah:
   - Melalui fasilitas lokakarya dan dialog antara pihak-pihak yang mengalami konflik mereka diharapkan dapat mengidentifikasi ancaman-ancaman dan ketakutan yang mereka rasakan masing-masing dan untuk membangun empati dan rekonsiliasi diantara mereka.
   - Meraih kesepakatan bersama yang mengakui kebutuhan identiitas pokok semua pihak.
5. *Teori kesalah pahaman antar budaya* berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidak cocokan dalam cara-cara komunikasi

diantara berbagai budaya yang berbeda. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah:

- Menambah pengetahuan pihak-pihak yang mengalami konflik mengenai budaya pihak lain.
- Mengurangi stereotip negatif yang mereka miliki tentang kelompok lain.
- Meningkatakan keefektifan komunikasi antar budaya.

6. *Teori transpormasi konflik* berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidak setaraan dan ketidak adilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah:

   - Mengubah berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebab kan ketidak setaraan dan ketidak adilan, termasuk kesenjangan ekonomi.
   - Menigkatkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang diantara pihak-pihak yang mengalami konflik
   - Menegembangkan berbagai proses dan sistem untuk mempromosikan pemberdayaan, keadilan, perdamaian, pengampunan, rekonsiliasi, pengakuan.

Max Weber menekankan dua tipe konflik yang sangat penting yaitu, pertama konflik dalam arena politik sebagai sesuatu yang fundamental. Baginya kehidupan sosial dalam kadar tertentu merupakan pertentangan untuk memperoleh kekuasaan dan dominasi oleh sebagian individu dan kelompok tertentu terhadap

yang lain dan dia tidak menganggap pertentangan untuk meperoleh keuntungan ekonomi. Sebaliknya Weber melihat dalam kadar tertentu sebagai tujuan pertentangan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Kedua, ialah tipe konflik dalam gagasan dan cita-cita. Weber berpendapat bahwa orang seringkali tertantang untuk memperoleh dominasi dalam hal pandangan dunia mereka, baik itu beruapa doktrin keagamaan, filsapat sosial ataupun konsepsi tenntang gaya hidup cultural yang terbaik. Lebih dari itu gagasan dan cita-cita tersebut bukan hanya dipertentangkan, tetapi dijadikan senjata atau alat dalam pertentangan lainnya (Nazsir, 2008 : 19-20)

Kekuasaan dan wewenang seringkali menjadi penyebab terjadinya konflik hal ini karena kekuasaan dan wewenang merupakan barang langka yang hampir semua individu dan kelompok menginginkannya, maka tak salah ketika individu atau kelompok ingin mengapai kekuasaan dan wewenang mesti melakukan kompetisi dengan individu lainnya atau kelompok lainnya. Secara otomatis ketika kekuasaan dan wewang sudah diraih maka peraih kekuasaan dan wewenang tersebut kemudian akan menjadi kelompok dominan terhadap kelompok lainnya. Apabila terjadi ketidak seimbangan distribusi kekuasaan dan wewenang seringkali merupakan penyebab konflik (Ritzer,2008:281).

Gambar 1

(Bagan Kerangka Pemikiran)

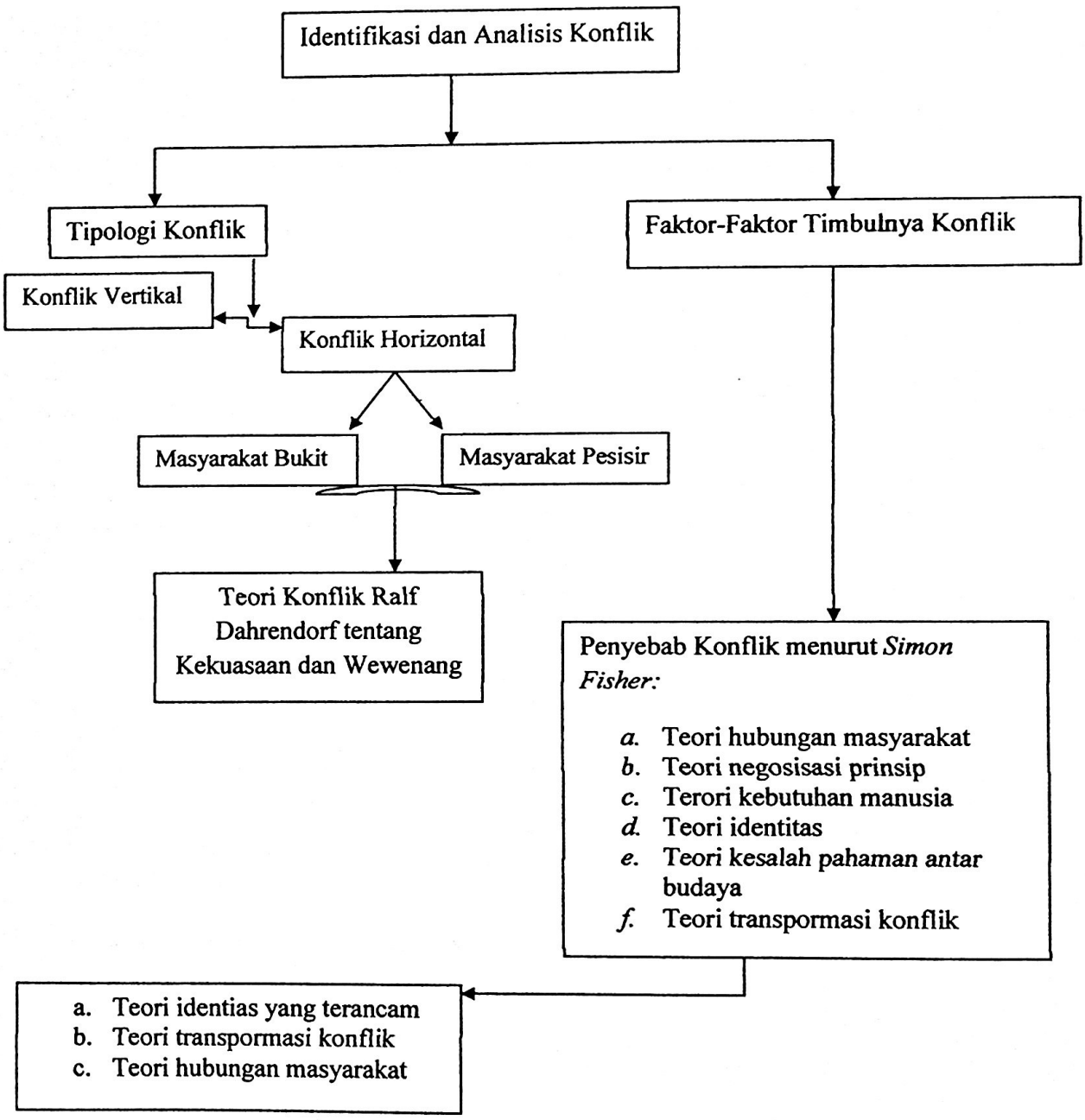

Sumber : Oleh Penulis

6. METODE PENELITIAN

6.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan rancangan kualitatif, mulai dari gagasan dan ide penelitian, mengumpulkan data, menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Penelitian yang dilakukan ini merupakan deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan, sehingga bersifat seadanya, hanya untuk mengungkapkan fakta. Penelitian ini menggambarkan Identifikasi dan Analisis Konflik Pada Pilkada kabupaten lampung barat tahun 2012.

6.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan mengambil lokasi di Kabupaten Lampung Barat. Pemilihan ini dilakukan secara *purposive* (ditetapkan dengan sengaja) dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Kabupaten Lampung Barat merupakan daerah yang dihuni oleh penduduk dari berbagai suku, ras dan agama. Dari perbedaan-perbedaan di atas maka Kabupaten Lampung Barat dikatakan daerah yang hiterogen.
2. Kabupaten Lampung Barat sedang mempersiapkan pemekaran kabupaten baru yakni Kabupaten Pesisir Barat..
3. Kabupaten Lampung Barat memiliki dua kelompok masyarakat yakni masyarakat yang tinggal di daerah bukit dan masyarakat yang tinggal dipesisir pantai, kedua kelompok masyarakat ini tentunya masing-masing menginginkan calon bupati yang terpilih dari daerah mereka masing-masing.

4. Kabupaten Lampung Barat telah melaksanakan pemilihan kepala daerah.

6.3. Penentuan Informan Penelitian

Subjek dan informan dalam penelitian ini dimaksud adalah informan peneliti yang berfungsi untuk menjaring sebanyak-banyaknya data dan informasi yang akan berguna bagi pembentukan konsep dan reposisi sebagai temuan peneliti (Bungin, 2003: 206).

Adapun kriteria informan:

1. Orang yang mengetahui kondisi masyarakatnya yakni masyarakat Bukit dan masyarakat Pesisir, dan calon bupati yang diinginkan oleh masyarakatnya
2. Orang yang terlibat aktif dalam mensukseskan pemilihan kepada daerah Lampung Barat, dengan mengajak orang lain untuk memilih calon bupati yang mereka dukung
3. Masyarakat bukit dan masyarakat pesisir

Dalam proses pemenuhan tuntutan fokus masalah kajian penelitian subjek dalam penelitian meliputi, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dari daerah bukit, dan tokoh masyarakat, tokoh pemuda dari daerah pesisir. Prinsip *snowball* (bola salju) digunakan untuk menjaring subjek penelitian. Jumlah informan utama ada 4 orang 2 tokoh masyarakat 2 tokoh pemuda, lalu informan pendukung berjumlah 7 orang, jadi jumlah seluruh informan ada 11 orang. Prinsip *snowball* maksudnya peneliti mengambil suatu subjek penelitian selanjutnya didasarkan petunjuk dari individu sebagai informan pertama tadi diminta menunjuk lagi orang yang sekiranya dapat diwawancarai untuk menggali informasi yang akurat, demikian seterusnya.

6.4. Unit Analisis

Adapun yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah Masyarakat Lampung Barat yang terlibat dalam Pilkada Kabupaten Lampung Barat 2012.

6.5. Data dan Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata, tindakan, selebihnya data tambahan seperti data dari jurnal-jurnal penelitian, koran, majalah dan dokumen. Beberapa jenis data yang diambil dari penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yaitu data utama yang berupa hasil wawancara / pembicaraan dan tindakan serta diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan informan dan pihak terkait yang mampu memberikan keterangan dalam rangka untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan fokus masalah penelitian.
2. Data Sekunder, yaitu data penunjang yang berhubungan dengan permasalahan peneliti. Sumber data didapat dari dokumen, buku dan keterangan dari sumber pendukung yang dapat memberikan pemahaman berkaitan fokus penelitian.

6.6. Teknik Pengumpulan Data

6.6.1. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data apabila:

1. Sesuai dengan tujuan penelitian,
2. Direncanakan dan dicatat secara sistematis,
3. Dapat dikontrol kehandalannya (reliabilitasnya) dan kesahihannya (vaiditasnya)

Peneliti melakukan observasi terhadap tokoh masyarakat dan tokoh pemuda bukit dan pesisir mengenai keadaan masyarakat sebelum pelkasanaan dan sesudah pelaksanaan pilkada di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012.

6.6.2 Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang permasalahan yang diteliti. Wawancara mendalam dilakukan secara intensif dan berulang-ulang. (Bungin, 2001: 157).

Dalam penelitian, wawancara berupa pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada informan menyampaikan pendapat, pandangan, fikiran dan perasaan tanpa ada paksaan dari peneliti. Tujuannya adalah memungkinkan pihak informan bebas mendefinisikan diri dalam lingkungan dengan menggunakan istilah mereka sendiri mengenai fenomena yang diteliti.

6.6.3 Dokumentasi

Dokumentasi yaitu data-data yang bersumber, terkait dan mendukung dengan penelitian, yang dapat berupa dokumen-dokumen, sumber-sumder lainnya baik yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung sehingga dapat melengkapi dan menunjang data penelitian yang berhubungan dengan data penulis.

6.7. Teknik Analisa Data

Tahap analisa data penelitian kuaitatif terbagai dalam tiga tahap, yaitu:

1. Reduksi Data

Pada proses / tahap pertama peneliti bisa mendapatkan banyak data baik dari hasil wawancara, observasi atau dokumentasi. Data yang terekam masih berupa data lapangan, yang masih perlu untuk dirangkum, diikhtisarkan atau diseleksi, masing-masing bisa dimasukkan ke dalam kategori tema yang sama, fokus yang sama atau permasalahan. Peneliti memusatkan pada data lapangan yaitu mengenai identifikasi dan analisis konflik dalam pemilihan kepala daerah, yang kemudian melakukan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Selanjutnya mereduksi data yang ada dilapangan sesuai dengan masalah yang diteliti pada tahapan ini data yang berhasil dikumpulkan dilapangan dirangkum dan kemudian diseleksi.

2. Penyajian Data *(Display Data)*

Satuan tumpukan data yang disusun atas dasar pikiran intuisi, pendapat atau kriteria tertentu. Informasi-informasi tadi akan dikategorikan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Penyajian data berfungsi sebagai daftar yang bisa secara ringkas dan cepat menunjukkan cakupan data yang telah dikumpulkan. Pada tahapan ini penyajian informasi melalui bentuk teks naratif terlebih dahulu, data-data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk cerita oleh peneliti.

3. Tahap kesimpulan

Pada tahapan ini peneliti akan melakukan uji kebenaran disetiap makna yang muncul dari data yang sudah ada. Artinya, seluruh data yang telah diproses pada tahapan reduksi dan penyajian data secara umum dapat ditarik kesimpulan

guna untuk mendapatkan intisari dan hasil dari seluruh proses penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aini, Nurul, 2006. *Sosiologi dan Politik.* Jakarta: PT Raja Grapindo Persada

Anwari dan Maruto, 2002. *Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat.* Jakarta:

Pustaka LP3ES Indonesia

Azhari, dan Syafiie, Kencana 2006. *Sistem Politik Indonesia.* Bandung: PT Refika Aditama

Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Fisher, Simon,dkk, 2001. *Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak.* Jakarta: SMK Grafika Desa Putra

Gatara, A,A, Said dan Said Dzulkiah, 2007. *Sosiologi Politik.* Bandung: CV Pustaka Setia

Goodman, Douglas J, 2004. *Teori Sosiologi Modern.* Jakarta: Prenada Media.

Haris, Peter dan Reilly Ben, 2000. *Demokrasi dan Konflik yang mengakar: sejumlah pilihan untuk Negosiator,* diterjemahkan oleh LP4M. Jakarta: Internasional IDEA

Hendro, Suhedi, 2003. *Memahami Ilmu Politik.* Widiasarana Indonesia, Jakarta: Gramedia.

Husman, Husaini. 2003. *Metode Penelitian Sosial.* Jakarta: PT Bumi Aksara

Kaho, Riwu. 2007. *Prospek Otonomi Daerah.* Jakarta: PT Rja Grafindo Persada

Kaloh. 2003. *Kepala Daerah.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Kamil. 2002. *Demokrasi dan Pembangunan Daerah.* Bandung: Widya Padjadjaran

Latif, Yudi, 2004. *Intelegensi Muslim dan Kuasa, Geneologi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20.* Bandung : Mizan Pustaka Anggota IKAPI

Magnis, Franz. 2003. *Karx Marx.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Mayo, Hendry B. 1960. *An Introduction To Demokrasi Theory.* New York: Oxford University Press

Mujani, Saiful.2002. *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik.* Jakarta: Rajawali Pers

Nasikun, 2011. *Sistem Sosial Indonesia.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Nazsir, Nasrullah, 2009. *Teori-teori sosiologi.* Bandung: Widya Padjadjaran

Pembaharuan, Suara. (Kumpulan Makalah Seminar) 2000. *Otonomi atau Federalisme*, Jakarta

Philipus, 2006. *Sosiologi dan Politik.* Jakarta: PT Raja Grapindo Persada

Ritzer, George. 2002. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ritzer, George, 2008. *Teori Sosiologi.* Yogyakarta: Kreasi Wacana

Rosyada, Dede, dkk, 2005. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani.* Jakarta: Prenada Media

Siswanto, Joko, 2006. *Reaksi Intelektualitas Untuk Demokrasi.* Palembang: Yayasan Bakti Nusantara : Pusat KajianKebijanan dan Pendidikan Politik

Simamora, Sahat, 1992. *Sosiologi Politik.* Jakarta: Rineka Cipta

Soekanto, Soejono. 1986. *Sosiologi Suatu Pengantar.* Jakarta: CV. Rajawali.

Soekanto, Soejono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar.* Jakarta: Rajagrafindo Persada

Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: CV Alfabeta

Suryadi, Budi, 2007. *Sosiologi dan Politik.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Syarwi, Pangi, 2012. *Titik Balik Demokrasi.* Jakarta: Pustaka Intelegensia

Syaukani, Imam, 2011. *Dasar-Dasar Politik Hukum.* Jakarta: Rajagrafindo Persada

Taneko, Soleman B. 1984. *Struktur dan Proses Sosial.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ubaidillah, Achmad, 2000. *Pendidikan Kewarga Negaraan.* Jakarta: Prenada Media

Undang-Undang Pemerintah Daerah 2004

Wiyono. 1993. *Masyarakat Madani dan Perubahan Sosial.* Jakarta: LP3ES

Yuwono, Salahudin. 2001. *Otonomi dan Politik.* Jakarta: Ghalia Indonesia

Sumber lainnya

Lampung Post 3 Agustus 2012. Agustus, Masa H. Fiterson Memanas.

Radar Lambar 15 Agustus 2012. Agustus, Dua Kandidat Calon Bupati Lambar.

Tribun Lampung 20 Agustus 2012. Agustus. H. Fiterson Banding ke PTUN Bandar Lampung.